



Judul : Mobil dinas dipakai mudik, komisi II ingatkan ASN jaga kepercayaan publik
Tanggal : Selasa, 31 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Mobil Dinas Dipakai Mudik Komisi II Ingatkan ASN Jaga Kepercayaan Publik

KPK mengindikasikan masih ada pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat menggunakan kendaraan operasional milik negara untuk mudik Lebaran 1447. Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mendesak agar aturan penggunaan mobil dinas ditegakkan secara tegas.

Menurut Deddy, hukuman bagi para pelanggar aturan bisa bermacam-macam, mulai dari pemberian surat peringatan hingga sanksi disiplin lainnya. Pasalnya, persoalan ini selalu berulang tiap tahun dan makin menunjukkan tingkat kedisiplinan ASN yang masih sangat rendah. Padahal, mestinya budaya malu harus dimulai dari level pejabat.

Deddy menegaskan, keteladanan pemimpin sangat diperlukan agar bawahan bersedia menuruti aturan yang berlaku. Kejadian yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi mendalam untuk melihat apakah hal itu bentuk pembangkangan atau arogansi. "Penguasaan publik harus diperkuat guna memantau perilaku ASN," katanya, kemarin.

Jika masalah sederhana seperti penggunaan kendaraan dinas saja tidak bisa tertib, sambung Deddy, pejabat akan sulit dipercaya dalam menangani hal besar. Solusi permanen harus segera dipikirkan agar fasilitas negara tidak disalahgunakan. Kedisiplinan adalah kunci utama menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Deddy mewanti-wanti agar arogansi pejabat tidak dibiarkan merusak citra instansi Pemerintah. Evaluasi mendalam harus membuktikan apakah penggunaan kendaraan

itu merupakan bentuk kebutuhan atau sekadar penyalahgunaan wewenang. "Penindakan harus dilakukan tanpa pandang pilih terhadap semua pelanggar aturan," tegasnya.

Senada, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengingatkan, aturan penggunaan mobil dinas secara tegas melarang kegiatan mudik. Karena itu, informasi terkait dugaan pelanggaran harus segera dicek kebenarannya. Penelusuran mendalam diperlukan untuk mengetahui alasan pejabat yang nekat menggunakan fasilitas itu.

Mardani mendesak Pemerintah menelusuri motif utama penggunaan kendaraan dinas untuk pulang kampung itu. Jika tidak ditemukan alasan yang masuk akal dan membenarkan tindakan tersebut, sanksi tegas wajib diberikan. "Integritas aparatur negara harus dijaga demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Pemerintah," ingatnya.

Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya menerima informasi penyalahgunaan kendaraan dinas di sejumlah instansi untuk kepentingan pribadi dan di luar kedinasan. Untuk itu, kepala daerah dan inspektorat diimbau untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungannya.

Budi menyebut, evaluasi harus dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi saat mudik Lebaran. "Langkah itu adalah upaya menjaga akuntabilitas serta integritas penyelenggara negara maupun ASN yang sedang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia," tegasnya. ■ TIF